# RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

JI. SOEKARNO HATTA No. 2-4 WONOSOBO TAHUN 2022

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2023 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga terwujud Peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Wonosobo, - - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, MSi

Pembina Utama Madya NIP. 196809251988031003

## **DAFTAR ISI**

| KATA P  | ENGA | NTAR  | i  |
|---------|------|---|----|
| DAFTAR  | ISI  |   | ii |
| BAB I   | PEN  | DAHULUAN  | 1  |
|         | 1.1  | Latar Belakang                                    | 1  |
|         | 1.2  | Landasan Hukum                                    | 7  |
|         | 1.3  | Maksud dan Tujuan                                 | 11 |
|         | 1.4  | Sistematika Penulisan                             | 12 |
| BAB II  | HAS  | SIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA          | 14 |
|         | SEK  | RETARIAT DAERAH PADA TAHUN 2021                   |    |
|         | 2.1  | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat  | 14 |
|         |      | Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Lalu/ 2021 dan    |    |
|         |      | Capaian Renstra Sekretariat Daerah                |    |
|         | 2.2  | Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah     | 27 |
|         | 2.3  | Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  | 28 |
|         |      | Sekretariat Daerah                                |    |
|         | 2.4  | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD               | 30 |
|         | 2.5  | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 44 |
| BAB III |      | UAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT<br>RAH    | 45 |
|         | 3.1  | Telaah Terhadap Kebijakan Nasional                | 45 |
|         | 3.2  | Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat    | 48 |
|         |      | Daerah  |    |
|         | 3.3  | Program dan Kegiatan                              | 50 |
| BAB IV  | REN  | ICANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT               | 56 |
|         | DAE  | ERAH  |    |
| BAB V   | PEN  | IUTUP   | 92 |

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka perencanaan jangka menengah, maupun panjang, perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonsobo tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2023.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD

yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Wonosobo tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. yaitu "TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA".

Berdaya Saing memiliki makna Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotongroyong, dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.

*Maju, mengandung makna* kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.

Sejahtera, memiliki arti Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan.

Maka untuk mencapai Misi Pertama yaitu "Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat"

maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah
- 2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah
- 3. Penyelenggaraan kebijakan daerah
- Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah

- 5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
- 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
- 7. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- 8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- 9. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

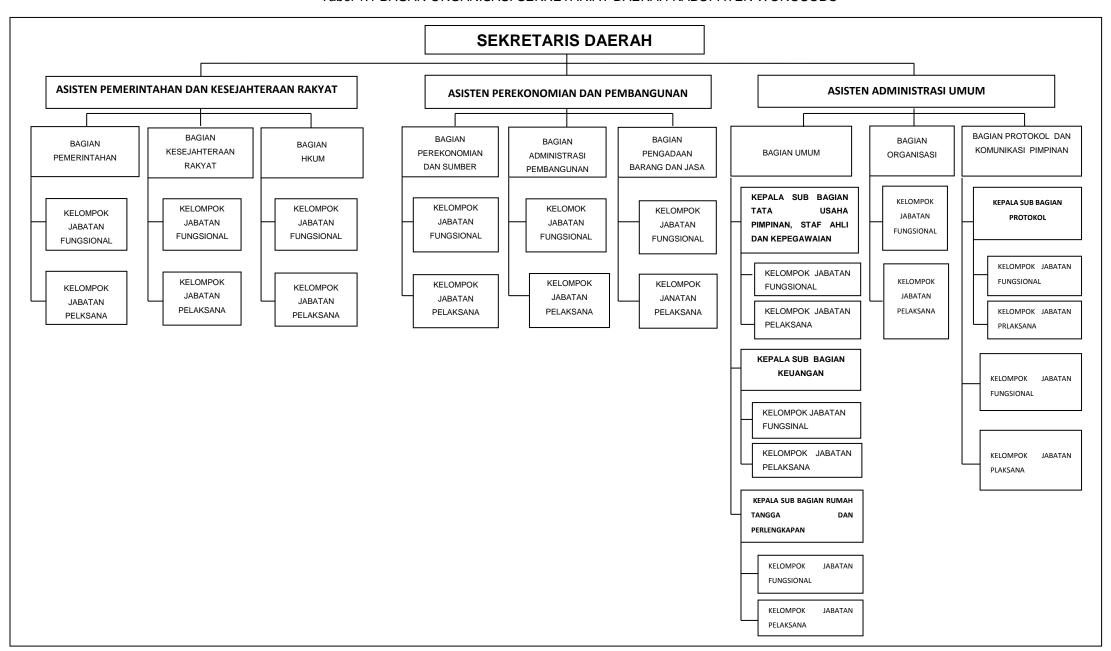
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari:

- a. SEKRETARIS DAERAH
- b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  - 1) Bagian Pemerintahan
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - 3) Bagian Hukum
- c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
  - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
  - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
  - 1) Bagian Umum
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2) Bagian Organisasi
  - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    - a) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok jabatan fungsional dan

f. Kelompok jabatan pelaksana

Apabila dilihat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
   Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
   Tengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana
   Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4833);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkart Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

- 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- 21. Peraturan Bupati Wonosono Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.

#### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini bertujuan:

 Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat
 Daerah Kabupaten Wonosobo.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajiaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

## Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2023 tema pembangunan nasional adalah: "adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,".

Sedangkan untuk tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari"

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema indikatif pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD tahun 2023 yaitu: "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi untuk Penumbuhan Daya Saing Daerah"

Terkait dengan Kebijakan Nasional Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu Perangkat Daerah belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

# Kabupaten WonosoboTahun 2023

| No | Kebijakan<br>Nasional                     | Prioritas<br>Pembangunan<br>Jawa Tengah                       | Isu Strategis<br>Kabupaten<br>Wonosobo | Prioritas<br>Pembangunan<br>Wonosobo   |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran | 1. Kemiskinan<br>Ekstrem               | <ol> <li>Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia.</li> <li>Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan</li> <li>Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Kelembagaan Sektor-sektor Ekonomi</li> <li>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah</li> <li>Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</li> </ol> |
|    |   |   | 2. Daya Saing<br>Ekonomi               | Pemerataan Sarana<br>Prasarana Wilayah<br>yang Berkualitas dan<br>Berkelanjutan  |

| No | Kebijakan<br>Nasional   | Prioritas<br>Pembangunan<br>Jawa Tengah  | Isu Strategis<br>Kabupaten<br>Wonosobo                       | Prioritas<br>Pembangunan<br>Wonosobo  |
|----|---|--|--|---|
| 2. | Peningkatan<br>Kualitas Sumber<br>Daya Manusia<br>(SDM) dalam hal<br>Kesehatan dan<br>Pendidikan                    | Pemantapan<br>kualitas hidup<br>dan kapasitas<br>sumber daya<br>manusia<br>menuju SDM<br>berdaya saing       | 1. Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia                        | 1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah  |
|    |   |  | 2. Kemiskinan<br>Ekstrem                                     | Peningkatan Kualitas<br>Hidup dan Kapasitas<br>Sumber Daya Manusia  |
|    |   |  | 3. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah         | Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Kondusivitas<br>Wilayah serta<br>Perbaikan Kapasitas<br>Fiskal Daerah  |
|    |   |  | 4. Daya Saing<br>Ekonomi                                     | Peningkatan Tata<br>Kelola Pemerintahan<br>dan Kondusivitas<br>Wilayah serta<br>Perbaikan Kapasitas<br>Fiskal Daerah  |
| 3. | 1.Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan Decent Job 2.Mendorong Pemulihan Dunia Usaha 3.Revitalisasi | Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan | 1.Kualitas<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kesenjangan<br>Wilayah | <ol> <li>Pemerataan Sarana         Prasarana Wilayah         yang Berkualitas         dan Berkelanjutan</li> <li>Pengembangan         Ekonomi Lokal         melalui Penguatan         Kelembagaan         Sektor -sektor</li> </ol> |

| No | Kebijakan<br>Nasional  | Prioritas<br>Pembangunan<br>Jawa Tengah   | Isu Strategis<br>Kabupaten<br>Wonosobo                                | Prioritas<br>Pembangunan<br>Wonosobo  |
|----|--|---|---|---|
|    | Industri dan<br>Penguatan Riset<br>Terapan   | keberlanjutan<br>lingkungan<br>hidup dan<br>ketahanan<br>bencana  | 2. Daya Saing Ekonomi  3. Kemiskinan Ekstrem                          | Ekonomi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Kelembagaan Sektor - sektor Ekonomi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Penguatan Kelembagaan Sektor - sektor Ekonomi |
| 4. | 1.Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap Perubahan Iklim) 2.Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar : Air Bersih dan Sanitasi | Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana | 1. Kualitas Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana 2. Kemiskinan Ekstrem | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan  |

# 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

#### 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Dengan indikator kinerja:

a. Nilai SAKIP

### 2. Terwujudnya pemerintahan yang kapabel

Dengan indikator kinerja:

- a. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- b. Nilai kematangan Organisasi Daerah (NKOD)
- c. Persentase penerapan TNDE

#### 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan indikator kinerja:

- a. Persentase ketercapaian SPM
- b. IKM

Tabel 3.2
Matriks Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Sesuai Renstra 2021-2026

|   | TUJUAN   | SASARAN   | INDIKATOR<br>SASARAN | ARAH KE   | KEBIJAKAN   |  |
|---|--|---|----------------------|---|---|--|
| 1 | Mewujudkan<br>pemerintahan<br>yang bersih dan<br>akuntabel | Terwujudnya<br>pemerintahan<br>yang bersih dan<br>akuntabel | Nilai SAKIP          | Kebijakan:<br>kualitas<br>pemerintahan<br>Pemerintahan<br>Kesejahteraan F | Peningkatan<br>manajemen<br>bidang<br>dan<br>Rakyat |  |

|   |  |   |   | Kebijakan: kualitas pemerintahan Perekonomian Pembangunan Kebijakan: kualitas pemerintahan Administrasi Umi   | Peningkatan<br>manajemen<br>bidang<br>dan<br>Peningkatan<br>manajemen<br>bidang |
|---|--|---|---|---|---|
| 2 | Mewujudkan<br>Pemerintahan<br>yang kapabel   | Terwujudnya<br>pemerintahan<br>yang kapabel | Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa Nilai Kematangan Organisasai Daerah (NKOD) | Kebijakan : Penir<br>pengelolaan pen<br>barang dan jasa<br>mendukung efisio<br>efektivitas dan tra<br>Keijakan : pening<br>kualitas evaluasi<br>kelembagaan | gadaan<br>yang<br>ensi,<br>ansparan<br>gkatan                                   |
|   |  |   | Persentase<br>penerapan<br>TNDE   | Kebijakan : Perce<br>penerapan TNDE<br>perangkat Daera  | E pada  |
| 3 | Meningkatkan<br>kualitas<br>pelayanan publik | Peningkatan<br>kualitas<br>pelayanan publik | Persentase<br>ketercapaian<br>SPM   | Kebijakan : penir<br>tatakelola penyel<br>(enam) urusan d<br>pemerintah daera<br>berkaitan dengar<br>dasar  | lenggaraan 6<br>asar wajib<br>ah yang   |
|   |  |   | IKM   | Kebijakan : peng<br>inovasi pelayana<br>untuk kemudaha  | n publik  |

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif anggaran, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan agar target yang ditetapkan dapat tercapai, program kegiatan tahun 2023 tersebut antara lain

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2023

|   |   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                       |              |
|---|---|---|--------------|
|   |   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             |              |
| 1 |   | Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)      | Pemerintahan |
|   | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan                        | Pemerintahan |
|   | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                      | Pemerintahan |
|   | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                     | Pemerintahan |
| 2 |   | Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan)         | Pemerintahan |
|   | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                        | Pemerintahan |
| 3 |   | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) | Kesra        |
|   | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual              | Kesra        |
|   | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian              | Kesra        |
|   |   | Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial                      |              |
|   | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian              | Kesra        |
|   |   | Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat                  |              |
| 4 |   | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ( Bagian Hukum)           | Hukum        |
|   | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                 | Hukum        |
|   | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                  | Hukum        |
|   | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan                         | Hukum        |
|   |   | Pengelolaan Informasi Hukum                               |              |

|   |   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |  |
|---|---|---|--|
| 1 |   | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian ( Bagian Perek & SDA)  | Perekonomian   |
|   | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi   | Perekonomian   |
|   |   | Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   |  |
|   | 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | Perekonomian   |
| 2 |   | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam ( Bagian Perek &  | Perekonomian   |
| _ |   | SDA)  |  |
|   | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perttanian,   | Perekonomian   |
|   |   | Kehitanan,  |  |
|   |   | Kelautan, dan Perikanan   |  |
|   | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan  | Perekonomian   |
|   |   | dan   |  |
|   |   | Lingkungan Hidup  |  |
| 3 |   | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Adbang)  | Adbang   |
|   | 1 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | Adbang   |
|   | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | Adbang   |
|   | 3 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | Adbang   |
| 4 |   | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian PBJ)  | PBJ  |
|   | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | PBJ  |
|   | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik   | PBJ  |
|   | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  | PBJ  |
|   |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |  |
|   |   | KABUPATEN/KOTA  |  |
|   |   | Adminitured Venezuman Denomalist Describ  | Umum   |
| 1 |   | Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Omam   |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Umum   |
| 2 |   |   |  |
|   | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |
|   | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Umum   |
|   | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                 | Umum   |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum   |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum Umum Umum,  |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum Umum Umum, Pemerintahan,  |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum,   |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum  Umum,  Pemerintahan,  Kesra, Hukum,  Perekonomian,                       |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum  Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ,             |
|   |   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Administrasi Umum Perangkat Daerah  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor | Umum  Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, |

|   | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Umum,         |
|---|---|--|---------------|
|   |   | , and the second | Pemerintahan, |
|   |   |  | Kesra, Hukum, |
|   |   |  | Perekonomian, |
|   |   |  | Adbang, PBJ,  |
|   |   |  | Organisasi,   |
|   |   |  | Prokompim     |
|   | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Umum,         |
|   | O | renyediaan bahan bacaan dan renaturan rendidang-ondangan   | Pemerintahan, |
|   |   |  |               |
|   |   |  | Kesra, Hukum, |
|   |   |  | Perekonomian, |
|   |   |  | Adbang, PBJ,  |
|   |   |  | Organisasi,   |
|   |   |  | Prokompim     |
|   | 7 | Penyediaan Bahan/Material  | Umum          |
|   | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Umum          |
|   | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Umum,         |
|   |   |  | Pemerintahan, |
|   |   |  | Kesra, Hukum, |
|   |   |  | Perekonomian, |
|   |   |  | Adbang, PBJ,  |
|   |   |  | Organisasi,   |
|   |   |  | Prokompim     |
| 2 |   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan   |               |
|   |   | Pemerintah Daerah  |               |
|   | 1 | Pengadaan mebel  | PBJ           |
|   | 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Umum, Adbang, |
|   |   |  | PBJ           |
|   | 3 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Umum          |
|   | 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau  | Umum          |
|   |   | Bangunan Lainnya   |               |
|   | 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor   | Umum          |
|   |   | atau   |               |
|   |   | Bangunan Lainnya   |               |
|   | 6 | Pengadaan aset tak berwujud  | PBJ           |
| 3 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |               |
|   | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Umum, Kesra,  |
|   |   |  | Hukum,        |
|   |   |  | Perekonomian, |
|   |   |  | Adbang, PBJ,  |
| l |   |  | _             |

|   |   |   | Organisasi,   |
|---|---|---|---------------|
|   |   |   | Prokompim     |
|   | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Umum          |
|   |   |   |               |
|   | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Umum,         |
|   |   |   | Organisasi    |
|   | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Umum,         |
|   |   |   | Pemerintahan, |
|   |   |   | Kesra, Hukum, |
|   |   |   | Perekonomian, |
|   |   |   | Adbang, PBJ,  |
|   |   |   | Organisasi,   |
|   |   |   | Prokompim     |
| 4 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan           |               |
|   |   | Pemerintah Daerah   |               |
|   | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Umum,         |
|   |   | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | Pemerintahan, |
|   |   |   | Hukum         |
|   | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Umum, Kesra,  |
|   |   | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | Perekonomian, |
|   |   |   | Adbang, PBJ,  |
|   |   |   | Organisasi,   |
|   |   |   | Prokompim     |
|   | 3 | Pemeliharaan Mebel  | Umum          |
|   | 4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Umum, Kesra,  |
|   |   |   | Hukum,        |
|   |   |   | Perekonomian, |
|   |   |   | Adbang, PBJ,  |
|   |   |   | Prokompim     |
|   | 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan        | Umum          |
|   |   | Lainnya   |               |
|   | 6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung    | Umum,         |
|   |   | Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                         | Organisasi    |
| 5 |   | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah         | Umum          |
|   |   | dan Wakil Kepala Daerah ( Bagian Umum)                      |               |
|   | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil       | Umum          |
|   |   | Kepala Daerah   |               |
|   | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala     | Umum          |
|   |   | Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              |               |
|   | 3 |   | Umum          |
| 1 |   |   |               |

|     |   | Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala |            |
|-----|---|--|------------|
|     |   | Daerah   |            |
|     | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan            | Umum       |
|     |   | Wakil Kepala Daerah  |            |
| 6   |   | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian              | Umum       |
|     |   | Umum)  |            |
|     | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                    | Umum       |
|     | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah              | Umum       |
|     | 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah               | Umum       |
| 7   |   | Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)                            | Organisasi |
|     | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                       | Organisasi |
|     | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                       | Organisasi |
|     | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                        | Organisasi |
| 3   |   | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian               | Prokompim  |
|     |   | Prokompim)   |            |
|     | 1 | Fasilitasi Keprotokolan  | Prokompim  |
|     | 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                     | Prokompim  |
| - 1 | 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                    | Prokompim  |

#### **BAB IV**

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran sebesar Rp29.460.936.427,- terdiri dari:
  - a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp15.361.982.660,-
  - b. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp3.884.042.488,-
  - c. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp699.221.520,-
  - d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp3.170.172.490,-
  - e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp2.509.618.547,-
  - f. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp1.563.046.962,-
  - g. Kegiatan fasilitasi kerumah tanggaan sekretariat daerah Rp1.650.000.000,-
  - h. Kegiatan penataan organisasi dengan anggaran Rp328.500.000,-
  - i. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan anggaran Rp294.351.760,-

- Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp4.803.683.100,- terdiri dari:
  - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan dengan anggaran Rp426.661.700,-
  - b. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan anggaran RP84.401.400,-
  - c. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan anggaran Rp3.892.620.000,-
  - d. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum dengan anggaran Rp400.000.000,-
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp2.030.657.284,- terdiri dari:
  - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan anggaran Rp525.000.000,-
  - Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam dengan anggaran
     Rp805.420.000,-
  - c. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan dengan anggaran Rp439.950.743,-
  - d. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran Rp260,304,541,-

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

|   | Kode |                       |      | Duaguage /Vasiatage | Sasaran Kegiatan  |   | Lokasi                             | Plafon Anggaran | Mataura san |                   |
|---|------|-----------------------|------|---------------------|---|---|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|   |      | Roue Flogram/Regiatan |      | Program/Kegiatan    | Out Put Kegiatan  | Target  | Kegiatan                           | Sementara (RP)  | Keterangan  |                   |
| 4 |      |                       |      |                     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN                                      | PEMERINTAHAN  |                                    |                 |             | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   |                       |      |                     | SEKRETARIAT DAERAH  |   |                                    |                 | 829,426,460 | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    |      |                     | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA                   | IN PEMERINTAHAN DAERAH  |                                    |                 | 318,363,360 | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.06 |                     | Administrasi Umum Perangkat D                               | Daerah  |                                    |                 | 237,704,200 | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.06 | 02                  | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan  | 12 paket                           |                 | 19,334,200  | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.06 | 05                  | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan   | 12 paket                           |                 | 17,200,000  | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.06 | 06                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>PeraturanPerundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan   | 12 dokumen                         |                 | 2,400,000   | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.06 | 09                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan perjalanan dinas Penyediaan makan minum rapat       | 12 laporan<br>12 bulan<br>12 bulan |                 | 198,770,000 | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.08 |                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |   |                                    |                 | 53,000,000  | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01   | 01                    | 2.08 | 04                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                    | Iuran Forsesdasi Sekda Wsb dan<br>iuran APKASI Bupati<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan | 1 kali<br>12 laporan               |                 | 53,000,000  | Bag. Pemerintahan |

| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer<br>pemerintahan Daerah   | Penyediaan Honorarium KPA, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Pengurus Barang ah Penunjang Urusan  | 12 bulan   | 27,659,160  | <b>)</b> Bag. Pemerintahan |
|---|----|----|------|----|---|---|--|-------------|----------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>perorangan Dinas atau kendaraan dinas<br>jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>Pemeliharaan kendaraan dinas<br>Penyediaan BBM, pelumas  | 5 unit<br>12 bulan<br>12 bulan   | 27,659,160  | Bag. Pemerintahan          |
| 4 | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN  | N KESEJAHTERAAN RAKYAT  |  | 511,063,10  | Bag. Pemerintahan          |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 |    | Administrasi Tata Pemerintahan  |   |  | 426,661,70  | Bag. Pemerintahan          |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi<br>Pemerintahan   | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Forkompimda, Camat dan lurah Jumlah Laporan SPM Jumlah laporan yang dihasilkan Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi Jumlah SPM yang dievaluasi Kajian Kebijakan Daerah | 51 Dokumen 20 Laporan 15 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen | 282,825,500 |                            |
| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan   | Jumlah Bimtek PATEN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan  | 1 Kali<br>48<br>Dokumen<br>4 Laporan<br>1 Laporan<br>20 Lokasi           | 71,427,200  | Bag. Pemerintahan          |

| 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah     | Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah Jumlah patok batas yang dimonitoring Jumlah Pelaksanaan PATEN yang dimonitoring Jumlah Perbub yang diterbitkan  Jumlah Cetak Buku LKPJ Jumlah Cetak Buku LPPD Jumlah Cetak Buku RLPPD Jumlah Cetak Media RLPPD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Laporan LKPJ Jumlah laporan LPPD Jumlah Laporan RLPPD Jumlah Laporan RLPPD Jumlah Publikasi RLPPD | 20<br>Kelurahan<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>200 Buku<br>50 Buku<br>50 Buku<br>1 Paket<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen | 72,409,000    | Bag. Pemerintahan |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---------------|-------------------|
| 4 | 01 | 02 | 2.04 |    | Fasilitasi Kerjasama Daerah               |  |   | 84,401,400    | Bag. Pemerintahan |
| 4 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri         | Jumlah Aplikasi Kerjasama<br>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi<br>Kerja Sama Dalam Negeri<br>Jumlah dokumen panduan<br>kerjasama<br>Jumlah MOU/Nota kesepakatan<br>Jumlah Sosialisasi  | 1 Aplikasi<br>15<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>6 Dokumen<br>1 Laporan  | 84,401,400    | Bag. Pemerintahan |
|   |    |    |      |    |   |  |   |               |                   |
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN       |  |   |               | Bagian Kesra      |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH                        |  |   | 4,098,334,723 | Bagian Kesra      |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA | N PEMERINTAHAN DAERAH  |   | 205,714,723   | Bagian Kesra      |

| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |   |                                     |   | 97,604,037 | Bagian Kesra |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------------------------|---|------------|--------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor             | Fasilitasi ATK Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 12 bulan<br>0 Paket<br>1 Paket      | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 18,479,037 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                | Fotocopy , Cetak Dokumen Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 12 bulan<br>0 Paket<br>2 Paket      | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 11,000,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>PeraturanPerundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan   | 12<br>Dokumen                       | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 1,200,000  | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD     | Fasilitasi Rapat Koordinasi<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan<br>0 Laporan<br>24 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 66,925,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |   |                                     |   | 73,180,000 | Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | Fasilitasi Surat Menyurat<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat   | 12 bulan<br>0 Laporan<br>1 Laporan  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 3,000,000  | Bagian Kesra |

| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor   | Fasilitasi Outsourching Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 orang 0 Laporan 1 Laporan   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur                                   | 70,180,000               | Bagian Kesra               |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|--------------------------|----------------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Dae<br>Pemerintahan Daerah   | rah Penunjang Urusan   |   |   | 34,930,686               | Bagian Kesra               |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya | Fasilitasi perawatan dan pajak kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin | 12 bulan 0 Unit 4 Unit 0 Unit 10 Unit                                   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo Timur  Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 24,930,686<br>10,000,000 | Bagian Kesra  Bagian Kesra |
| 4 | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PEMERINTAHAN DA  | Lainnya yang Dipelihara N KESEJAHTERAAN RAKYAT   |   |   | 3,892,620,000            | Bagian Kesra               |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 |    | Pelaksanaan Kebijakan Kesejah  | teraan Rakyat  |   |   | 3,892,620,000            | Bagian Kesra               |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental<br>Spiritual  | Fasilitasi FKP dan publikasi<br>Kebijakan Bidang Bina Mental<br>Fasilitasi Haji<br>Fasilitasi Kegiatan Keagamaan<br>Fasilitasi Lomba Keagamaan<br>fasilitasi Operasional Baznas<br>wonosobo  | 2 kali<br>1 kali<br>12 kali<br>3 kali<br>12 bulan<br>12 bulan<br>7 kali | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur                                   | 3,437,620,000            | Bagian Kesra               |

|   |    |    |      |    |   | Fasilitasi Operasional Masjid Jami Fasilitasi Peringatan/hari raya keagamaan Fasilitasi Tenaga outsourching bidang Bina Mental Spiritual Fasilitasi Update data base Keagamaan Hibah sapi untuk lembaga/ormas keagamaan atas nama pemerintah daerah insentif Guru Ngaji Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Koordinasi Bidang Keagamaan Penyiapan bahan materi kebijakan pemerintah daerah Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan | 2 orang 3 dokumen 5 ekor 590 orang 7 dokumen 4 kali 1 okumen 1 dokumen           |   |             |              |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|-------------|--------------|
| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan<br>Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan<br>Sosial | Fasilitasi FKP dan Publikasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Fasilitasi perumusan Perbup Fasilitasi tenaga Outsourching bidang Kesejahteraab Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,  | 5 kali 5 dokumen 2 orang 58 Dokumen 6 kali 28 kali 6 kali 6 kali 24 kali 48 kali | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 375,000,000 | Bagian Kesra |

| 4 | 01 | 02 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan<br>Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan<br>Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Koordinasi Bidang keluarga Berencana Koordinasi Bidang Kesehatan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Koordinasi Bidang Pengendalian penduduk Koordinasi Bidang Perlindungan Anak Koordinasi Bidang sosial Koordinasi Satgas Penanganan covid-19 Monev Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial Fasilitasi FKP dan Publikasi Kebijakan Bidang kesmas Fasilitasi koordinasi bidang kesmas |                   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 80,000,000 | Bagian Kesra |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------------|---|------------|--------------|
|   |    |    |      |    |   | Fasilitasi Perumusan Perbup<br>Fasilitasi tenaga Outshorching  | 2 kali            |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | staf Bidang Kesmas   | 18 kali           |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Jumlah Dokumen Hasil   | 2 dokumen         |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Kebijakan, Evaluasi, dan   | 1 orang           |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Capaian Kinerja Terkait  | 4 okumen          |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Kesejahteraan Masyarakat yang<br>Meliputi Urusan Kepemudaan  | 5 kali<br>12 kali |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | dan Olahraga, Pariwisata,  | I ∠ KdII          |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Pendidikan, Kebudayaan,  |                   |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Perpustakaan, Kearsipan,   |                   |   |            |              |
|   |    | ĺ  |      |    |   | i ci pastakaari, kearsipari,   | l                 |   |            |              |
|   |    |    |      |    |   | Trantibum Linmas Koordinasi  |                   |   |            |              |

|          |     |     |      |    |   | Kesmas/koordinasi dalam<br>daerah  |                                    |             |              |
|----------|-----|-----|------|----|---|--|------------------------------------|-------------|--------------|
|          |     |     |      |    |   |  |                                    |             |              |
| 4        |     |     |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN                                  | PEMERINTAHAN   |                                    |             | Bagian Hukum |
| 4        | 01  |     |      |    | SEKRETARIAT DAERAH                                      |  |                                    | 597,271,500 | Bagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA               | AN PEMERINTAHAN DAERAH   |                                    | 197,271,500 | Bagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat D                           | Daerah   |                                    | 144,071,500 | Bagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor         | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan   | 12 Paket                           | 15,117,500  | Bagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan                           | penyediaan administrasi kantor Jumlah Paket Barang Cetakan   | 12 bulan<br>12 Paket               | 15 124 000  | Dagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 | US | Penggandaan   | dan Penggandaan yang Disediakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | 12 bulan                           | 15,134,000  | Bagian Hukum |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan                             | Jumlah Dokumen Bahan   | 12                                 | 13,820,000  | Bagian Hukum |
|          |     |     |      |    | PeraturanPerundang- undangan                            | Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan<br>pengadaan buku peratuan<br>perundang undangan dan                     | Dokumen<br>12 bulan                |             |              |
| <u>_</u> | 0.4 | 0.1 | 2.06 |    |   | langganan koran  | 42.1                               | 100 000 000 | 5            |
| 4        | 01  | 01  | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pelaksaan perjalanan diinas luar daerah penyediaan minum dan makan | 12 Laporan<br>12 bulan<br>12 bulan | 100,000,000 | Bagian Hukum |

|   |    |    |      |    |   | rapat   |                                      |             |              |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Uru   | san Pemerintahan Daerah   |                                      | 20,700,000  | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                           | 1,500,000   | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan penyediaan honor kuasa pengguna anggaran (KPA),PPK SKPD,Bendahara Pengeluaran,                           | 12 bulan<br>12 Laporan<br>12 Bulan   | 19,200,000  | Bagian Hukum |
|   | 01 | 01 | 2.00 |    | Domolihovoon Bovona Milik Doo   | penyiapan dokumen<br>gaji,Pengurus Barang   |                                      | 22 500 000  | Dagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daei<br>Pemerintahan Daerah   | ran Penunjang Orusan  |                                      | 32,500,000  | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan perorangan Dinas<br>atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>pemeliharaan rutin/berkala<br>kendaraan bermotor dan biaya | 12 Unit                              | 25,000,000  | Bagian Hukum |
|   |    |    |      |    |   | operasional   |                                      |             |              |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>pemeliharaan rutin/berkala<br>peralatan kantor   | 12 Unit<br>12 bulan                  | 7,500,000   | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PEMERINTAHAN DAI  | N KESEJAHTERAAN RAKYAT  |                                      | 400,000,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2.03 |    | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | 1   |                                      | 400,000,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk<br>Hukum Daerah  | bimbingan teknis peraturan<br>perundang undangan<br>Jumlah Produk Hukum Daerah  | 2 kegiatan<br>12 dokumen<br>3 pansus | 105,000,000 | Bagian Hukum |

|   |    |    |      |    |   | yang Disusun pendampingan kunjungan kerja pansus DPRD pengkajian dan evaluasi peraturan daerah penyusunan propemperda rapat penyusunan raperda dan peraturan bupati  | 2 dokumen<br>2 dokumen<br>50 dokumen  |             |              |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-------------|--------------|
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum  | bantuan hukum kepada<br>masyarakat miskin<br>fasilitasi penanganan<br>permasalahan hukum<br>perdata/TUN bagi kepala<br>daerah dan perangkat daerah<br>Jumlah Kasus yang<br>Mendapatkan Fasilitasi Bantuan<br>Hukum<br>pelaksanaan program kerja<br>komda HAM<br>Penyusunan laporan ranham              | 10 perkara<br>4 Kasus<br>12 Kasus<br>1 dokumen<br>4 dokumen   | 100,000,000 | Bagian Hukum |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Pendokumentasian Produk<br>Hukum dan Pengelolaan<br>Informasi Hukum | bimbingan teknis bagi pengelola JDIH cetak buku himpunan berita daerah cetak buku himpunan lembaran daerah Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi operasional dan pengelolaan website JDIH pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum pembinaan anggota JDIH | 60 orang 100 buku 100 buku 12 Dokumen 1 website 2kelompok 5 OPD 20 desa 60 orang 50 dokumen 2 dokumen 3 media | 195,000,000 | Bagian Hukum |

|   |    |    |      |    |   | perangkat daerah pembinaan anggota JDIH tingkat desa penyuluhan hukum terpadu penyusunan abstrak produk hukum pertemuan berkala dan penerimaan penghargaan JDIH publikasi media cetak sosialisasi peraturan perundang undangan | 60 orang                  |   |             |               |
|---|----|----|------|----|---|--|---------------------------|---|-------------|---------------|
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN                                      | DEMEDINITALIANI  |                           |   |             |               |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH  | FLIVERINIANAN  |                           |   | 667,120,768 | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA                   | AN PEMERINTAHAN DAERAH   |                           |   | 227,170,025 | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat I                               | Daerah   |                           |   | 124,275,494 | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Pembelian alat Tulis Kantor<br>(ATK)   | 1 Paket<br>12 Bulan       | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Wonosobo<br>Timur  | 10,275,494  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                | cetak dan fotocopy<br>Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan  | 12 Bulan<br>1 Paket       | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 12,000,000  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>PeraturanPerundang- undangan | Bahan bacaan koran<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan  | 12 Bulan<br>12<br>Dokumen | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Wonosobo<br>Timur  | 2,000,000   | Bagian Adbang |

| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>makan minum rapat,<br>perjalanan dinas luar daerah        | 12 Laporan<br>12 Bulan | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 100,000,000 | Bagian Adbang |
|---|----|----|------|----|---|--|------------------------|---|-------------|---------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah   | Penunjang Urusan   |                        |   | 12,465,343  | Bagian Adbang |
|   |    |    |      |    | Pemerintah Daerah   |  |                        |   |             |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit<br>1 Paket      | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo          | 12,465,343  | Bagian Adbang |
| _ | 01 | 01 | 2.00 |    |   | LCD  |                        | Timur   |             | Pagian Adhang |
| 4 | 01 |    | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Uru   |  |                        |   | 26,800,487  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat   | jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>pembelian Meterai  | 12 Laporan<br>12 Bulan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo             | 1,869,801   | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor  | Honor pengelolaan keuangan<br>dan penatausahaan keuangan<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan | 12 Bulan<br>12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur    | 24,930,686  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer<br>Pemerintahan Daerah   | rah Penunjang Urusan   |                        |   | 63,628,701  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Perawatan kendaraan bermotor    | 5 Unit<br>12 Bulan     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur    | 43,628,701  | Bagian Adbang |

| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya      | Jasa service dan penggantian<br>komponen<br>Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara   | 12 Bulan<br>6 Unit   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur      | 20,000,000  | Bagian Adbang |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|-------------|---------------|
| 4 | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN P                       | EMBANGUNAN  |  |  | 439,950,743 | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 |    | Pelaksana Administrasi Pemban                    | gunan   |  |  | 439,950,743 | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi penyusunan Program<br>Pembangunan     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen PK jumlah perbup yang tersususn Jumlah Renja yang tersusun   | 3 Dokumen  1Dokumen  1 Dokumen  1Dokumen                             | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Wonosobo<br>Timur | 39,776,001  | Bagian Adbang |
| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi<br>Program Pembangunan | Fasilitasi monitoring dan evaluasi proyek strategis daerah Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunanram Pembangunan Jumlah perangkat daeah yang dimonitoring Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Persentase kegiatan kebencanaan yang difasilitasi | 1 Dokumen 4 Laporan 48 Perangkat Daeah 4 Perangkat Daerah 100 Persen | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur                | 238,078,405 | Bagian Adbang |

| 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan | Jumlah dokumen LKJIP setda yang tersusun Jumlah dokumen RTP SPIP MRI setda yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah se kabupaten wonosobo Jumlah peresmian pembangunan | 1 Dokumen 1 Dokumen 19 Laporan 16 Laporan 1 Paket | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Wonosobo<br>Timur  | 162,096,337 | Bagian Adbang |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--|-------------|---------------|
|   |    |    |      |    |  |  |   |  |             |               |
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN I   | PEMERINTAHAN   |   |  |             |               |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH   |  |   |  | 746,184,541 |               |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA                        | AN PEMERINTAHAN DAERAH   |   |  | 485,880,000 |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat I                                    | Daerah   |   |  | 215,500,000 |               |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan   | 12 Paket  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 18,000,000  | Bagian PBJ    |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan  | 12 Paket  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 25,000,000  | Bagian PBJ    |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>PeraturanPerundang- undangan      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan  | 12<br>Dokumen                                     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 2,500,000   | Bagian PBJ    |

| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 27 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 170,000,000 | Bagian PBJ |
|---|----|----|------|----|---|--|------------|--|-------------|------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Daerah      | Penunjang Urusan   |            |  | 202,380,000 |            |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                      | 30 Unit    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 80,000,000  | Bagian PBJ |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang Disediakan                 | 14 Unit    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 97,380,000  | Bagian PBJ |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                             | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud<br>yang Disediakan                           | 1 Unit     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 25,000,000  | Bagian PBJ |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Uru                           | san Pemerintahan Daerah  |            |  | 31,000,000  |            |
| ` | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan jasa surat<br>menyurat                       | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                           | 1 Laporan  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 1,000,000   | Bagian PBJ |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan | 12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 30,000,000  | Bagian PBJ |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer<br>Pemerintahan Daerah   | rah Penunjang Urusan   |            |  | 37,000,000  |            |

| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa pemeliharaan ,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Perizinannya | 5 Unit        | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 20,000,000    | Bagian PBJ          |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------|--|---------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara   | 20 Unit       | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 17,000,000    | Bagian PBJ          |
| 4 | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PEREKONOMIAN   | DAN PEMBANGUNAN   |               |  | 260,304,541   |                     |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 |    | Pengelolaan Pengadaan Barang   | dan Jasa  |               |  | 260,304,541   |                     |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pengadaan Barang<br>dan Jasa  | 50<br>Dokumen | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 109,820,028   | Bagian PBJ          |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan secara Elektronik   | Jumlah Dokumen Hasil Layanan<br>Pengadaan Secara Elektron   | 12<br>Dokumen | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 44,575,217    | Bagian PBJ          |
| 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa  | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Pembinaan dan Advokasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                              | 300 Orang     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 105,909,296   | Bagian PBJ          |
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN   | PEMERINTAHAN  |               |  |               | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH   |   |               |  | 1,522,567,012 | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA  | AN PEMERINTAHAN DAERAH  |               |  | 192,147,012   | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat D  | Daerah  |               |  | 148,723,257   | Bag<br>Perekonomian |

| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor              | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang di<br>sediakan<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kanto                | 1 Paket 30 jenis 12 bulan                                       | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 5,343,257   | Bag<br>Perekonomian |
|---|----|----|------|----|--|--|---|---|-------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                 | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | 2 jenis<br>1 Paket<br>12 bulan                                  | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 11,400,000  | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 2 jenis<br>1 Dokumen<br>12 bulan                                | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1,980,000   | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD      | umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman Rapat, dan tamu yang disediakan Jumlah   | 1 Laporan<br>600 orang<br>kali<br>17 HOK<br>143 HOK<br>12 bulan | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 130,000,000 | Bag<br>Perekonomian |

|   |    |    |      |    |   | pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | 12 bulan<br>12 bulan                |   |            |                     |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------------------------|---|------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  | Pemerintahan Daerah   |                                     |   | 29,023,755 | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat   | Jumlah Administrasi Surat<br>menyurat yang bermaterai<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | 160 lembar<br>1 Laporan<br>12 bulan | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 1,600,000  | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor  | Jumlah pejabat pengelola<br>administrasi keuangan<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | 3 Orang<br>bulan<br>12 bulan        | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 27,423,755 | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer<br>Pemerintahan Daerah   | ah Penunjang Urusan   |                                     |   | 14,400,000 | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan roda empat dan  | 1 Unit 5<br>Unit 12<br>bulan        | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 10,400,000 | Bag<br>Perekonomian |

|   |    |    |      |    |   | kendaraan roda dua yang<br>dipelihara rutin dan berkala<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan   |   |  |               |                     |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|---------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | 1 Unit 10<br>Unit 12<br>bulan                                   | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan    | 4,000,000     | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PEREKONOMIAN  | DAN PEMBANGUNAN   |   |  | 1,330,420,000 | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 1  | 3  | 2.01 |    | Pelaksanaan Kebijakan Perekond  | omian   |   |  | 525,000,000   | Bag<br>Perekonomian |
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan<br>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD<br>dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah rekomandasi hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Optimalisasi Kinerja dan Pembinaan BLUD berupa Monitoring, Evaluasi ,an Pembinaan, sosialisasi, | 12<br>Dokumen<br>190<br>Dokumen<br>50 Laporan<br>140<br>laporan | Kab.<br>Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 175,000,000   | Bag<br>Perekonomian |

|   |    |    |      |    |   | rapat koordinasi BLUD Optimalisasi Kinerja dan Pembinaan BUMD berupa Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan, sosialisasi, rapat koordinasi BUMD. Pelaksanaan seleksi Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi BUMD   |   |   |             |                     |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---|-------------|---------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan<br>Distribusi Perekonomian | Fasilitasi Dekranasda berupa Rapat Koordinasi pengurus Dekranasda, mengikuti kegiatan Dekranasda Provinsi dan Dekranas, FGD, Pembinaan Perajin, Pengelolaan Showroom Dekranasda, Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berupa Rapat Koordinasi TPID Pusat dan Daerah, High Level Meeting, Rakor Terpadu Lintas sektoral, FGD, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Operasional | 12 Laporan<br>16 laporan<br>12 Laporan<br>34 Laporan<br>6 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 350,000,000 | Bag<br>Perekonomian |

| 4 | 1  | 3  | 2.04 |    | Pemantauan Kebijakan Sumber  | Sekretariat DBHCHT berupa<br>Rapat koordinasi Tim<br>Koordinasi dan Pengkaji<br>DBHCHT, Sekretariat<br>DBHCHT dan Perangkat<br>Daerah Pengampu kegiatan<br>DBHCHT, Koordinasi dengan<br>Pemprov dan pemerintah<br>Pusat, Workshop, FGD,<br>Monitoring dan Evaluasi  |   |   | 805,420,000 | Bag                            |
|---|----|----|------|----|--|---|---|---|-------------|--------------------------------|
| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi<br>Kebijakan Pertanian, Kehutanan,<br>Kelautan, dan Perikanan | Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) berupa Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal | 0 laporan<br>12<br>Dokumen<br>128<br>laporan 60<br>kali 58 ka | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 755,420,000 | Perekonomian  Bag Perekonomian |

| 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi<br>Kebijakan Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup | (DBHCHT) berupa Pengumpulan Informasi serta Operasi Bersama pemberantasan BKC ilegal melibatkan Kantor Bea Cukai Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) berupa : Rakor perencanaan, monitoring dan evaluasi, Rakor antar perangkat daerah terkait, Sosialisasi melalui tatap muka, media cetak, media elektronik Fasilitasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam berupa Rapat koordinasi, FGD, dan Monitoring Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang | 6 laporan<br>12<br>Dokumen 6<br>Dokume | Kab. Wonosobo,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 50,000,000 | Bag<br>Perekonomian |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|------------|---------------------|
|   |    |    |      |    |  | _   |  |   |            |                     |

|   |    |    |      |    | 1   | 1   |                    |   |                | l           |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------------|---|----------------|-------------|
|   |    |    |      |    |   |   |                    |   |                |             |
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN  | PEMERINTAHAN  |                    |   |                | Bagian Umum |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH  |   |                    |   | 26,706,130,047 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA                           | AN PEMERINTAHAN DAERAH  |                    |   | 26,706,130,047 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangka                                      | at Daerah   |                    |   | 15,361,982,660 |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN  | 130<br>Orang/bulan | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 15,361,982,660 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat D                                       | Daerah  |                    |   | 2,572,000,000  |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket            | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur                | 70,0000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                        | 1 Paket            | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Wonosobo<br>Timur              | 40,000,000     | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah<br>Tangga yang Disediakan                                      | 1 Paket            | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur                          | 50,000,000     | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket            | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo                      | 12,000,000     | Bagian Umum |

|   |    |    |      |    |  |   |               | Timur   |               |             |
|---|----|----|------|----|--|---|---------------|---|---------------|-------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                 | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                   | 1 Paket       | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 40,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan | 12<br>Dokumen | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 35,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   | 1 Paket       | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 75,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu   | 12 Laporan    | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 1,050,000,000 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 12 Laporan    | Kab.<br>Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 1,200,000,000 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Daerah           | Penunjang Urusan  |               |   | 484,376,177   |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang Disediakan                          | 12 Unit       | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur    | 484,376,177   | Bagian Umum |

| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan   | 4 Unit     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 0             | Bagian Umum |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|--|---------------|-------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                   | 2 Unit     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 0             | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan         | 13 Unit    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 0             | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urus   | san Pemerintahan Daerah   |            |  | 2,874,724,248 |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat  | 0 Laporan  |  | 11,500,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik   |   |            |  | 679,365,748   | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                       | 12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 55,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      | 12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 2,128,858,50  | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer   | ah Penunjang Urusan   |            |  | 2,200,000,00  |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 12 Unit    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 450,000,000   | Bagian Umum |

| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan dibayarkan<br>Pajak dan Perizinannya   | 9 Unit            | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 550,000,000   | Bagian Umum |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------------|--|---------------|-------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 1318 Unit         | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 60,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 80,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 12 Unit           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 1,000,000,000 | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 60,000,000    | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 |    | Administrasi Keuangan dan Ope<br>Wakil Kepala Daerah  | erasional Kepala Daerah dan   |                   |  | 1,563,046,962 |             |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                      | 24<br>Orang/Bulan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 727,616,437   | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan<br>Atribut Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah yang Disediakan | 1 Paket           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 200,000,000   | Bagian Umum |
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Medical Check Up Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala                                 | 4 Orang           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo          | 35,430,525    | Bagian Umum |

|   |    |    |      |    |   | Daerah   |  | Timur  |               |                     |
|---|----|----|------|----|---|--|--|--|---------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang<br>Operasional Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima<br>Dana Penunjang Operasional<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | 2<br>Orang/Bulan                             | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 600,000,000   | Bagian Umum         |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 |    | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sek  | retariat Daerah  |  |  | 1,650,000,000 |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Kepala Daerah                                | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Kepala<br>Daerah yang Disediakan                              | 1 Paket                                      | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 600,000,000   | Bagian Umum         |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Wakil Kepala<br>Daerah yang Disediakan                        | 1 Paket                                      | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 550,000,000   | Bagian Umum         |
| 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah                           | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Daerah yang Disediakan                         | 1 Paket                                      | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo<br>Timur | 500,000,000   | Bagian Umum         |
|   |    |    |      |    |   |  |  |  |               |                     |
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN  | PEMERINTAHAN   |  |  |               | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |  | 588,259,760   | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA<br>KABUPATEN/KOTA   | AN PEMERINTAHAN DAERAH   |  |  | 588,259,760   | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat [   | Daerah   |  |  | 199,164,000   | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                   | Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan<br>KantorAlat/Bahan untuk                                       | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur    | 55,574,000    | Bagian<br>Prokompim |

|   |    |    |      |    |   | Kegiatan kantor Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Souvenir/Cendera Mata Belanja Bahan-Bahan Lainnya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>7 Paket |   |            |                     |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                | Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan   | 12 Bulan<br>1 Paket                         | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 27,000,000 | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>PeraturanPerundang- undangan | Belanja Langganan Jurnal/Surat<br>Kabar/Majalah<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan   | 12 Bulan<br>1460                            | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 6,590,000  | Bagian<br>Prokompim |

|   |    | Ī  |      |    |  | dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan   | Dokumen  |   |             |                     |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|-------------|---------------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD  | Belanja makanan dan Minuman<br>Rapat<br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Belanja Sewa Kendaraan<br>Bermotor Penumpang<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 110,000,000 | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urus   | san Pemerintahan Daerah  |  |   | 27,744,000  |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Belanja Paket/Pengiriman<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat  | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Laporan              | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 1,650,000   | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor   | Belanja Jasa Pelaksanaan<br>Transaksi Keuangan Belanja<br>makanan dan Minuman Rapat<br>Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                                      | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>2 Laporan              | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 26,094,000  | Bagian<br>Prokompim |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer<br>Pemerintahan Daerah  | ah Penunjang Urusan  |  |   | 67,000,000  |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa pemeliharaan ,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>6 Unit                 | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 50,000,000  | Bagian<br>Prokompim |

| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah TanggaAlat  |   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 17,000,000  | Bagian<br>Prokompim |
|---|----|----|------|----|---|--|---|---|-------------|---------------------|
|   |    |    |      |    |   | Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat studioPeralatan Cetak Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat StudioPeralatan Studio Video dan Film Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>27 Unit               | wonosobo Himur                                |             |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 |    | Pelaksanaan Protokol dan Komu               |  |   |   | 294,351,760 |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan                     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi  | 12 Bulan<br>12 Laporan  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,                   | 15,000,000  | Bagian<br>Prokompim |
|   |    |    |      |    |   | Keprotokolan   | apo.a   | Wonosobo Timur                                |             |                     |
| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunuikasi Pimpinan             | Belanja Jasa Pelaksanaan<br>Transaksi Keuangan Belanja<br>Jasa Penerangan,<br>Iklan/Reklame, Film dan<br>Pemotretan Belanja<br>makanan dan Minuman   | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>6 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 122,020,000 | Bagian<br>Prokompim |

| 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan              | Rapat Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Laporan | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 157,331,760 | Bagian<br>Prokompim |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|-------------|---------------------|
| 4 |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN                          | DEMEDINITALIANI   |  |   |             | Bag Organisasi      |
| 4 | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH                              | FLIVIENINIANAIN   |  |   | E40 000 000 | Bag Organisasi      |
| 4 | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSA                         | N PEMERINTAHAN DAERAH   |  |   | 540,000,000 | Bag Organisasi      |
|   |    |    |      |    | KABUPATEN/KOTA                                  |   |  |   | 540,000,000 | Dag Organisasi      |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat D                   | Daerah  |  |   | 145,000,000 | Bag Organisasi      |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan  | 1 Paket  | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 9,500,000   | Bag Organisasi      |

| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan   | 1 Paket       | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 12,300,000  | Bag Organisasi |
|---|----|----|------|----|---|---|---------------|---|-------------|----------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan                               | 12<br>Dokumen | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 3,200,000   | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 24 Laporan    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 120,000,000 | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urus  |   |               | 34,000,000                                    |             |                |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat  | 100 Laporan   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 1,000,000   | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | 4 Laporan     | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 15,000,000  | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan  | 12 Laporan    | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 18,000,000  | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daer  |   |               | 32,500,000                                    |             |                |
|   |    |    |      |    | Pemerintahan Daerah   |   |               |   |             |                |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya            | 5 Unit        | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 25,000,000  | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan<br>Prasarana Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit        | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 7,500,000   | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 |    | Penataan Organisasi   |   |               |   | 328,500,000 |                |

| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis<br>Jabatan | Jumlah dokumen AnjabABK yang disusun Jumlah dokumen kematangan organisasi yang disusun Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Raperbup yang disusun  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>44<br>Dokumen<br>40<br>Dokumen                           | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 112,500,000 | Bag Organisasi |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|-------------|----------------|
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan<br>Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah OPD yang difasilitasi Sosialisasi, FGD, Pelatihan, Pendampingan penyusunan Proses Bisnis Jumlah peserta Bintek Penyusunan Proposal KIPP (inovator) Jumlah peserta/inovasi lomba inovasi pelayanan publik Jumlah unit pelayanan/ Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat | 5 Laporan<br>50<br>Perangkat<br>Daerah<br>40 Inovator<br>40 Peserta<br>80 Unit/OPD | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 110,000,000 | Bag Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi<br>Birokrasi  | Jumlah Dokumen Peningkatan<br>Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah dokumen SAKIP yang<br>disusun<br>Jumlah Perangkat Daerah yang<br>difasilitasi dalam pelaksanaan<br>Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang<br>difasilitasi pengelolaan<br>SAKIPnya   | 3 Dokumen 5 Dokumen 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 2 Dokumen 1 Aplikasi   | Kab. Wonosobo,<br>Wonosobo,<br>Wonosobo Timur | 106,000,000 | Bag Organisasi |

| _ | _ | _ |                                      |     |
|---|---|---|--------------------------------------|-----|
|   |   |   | Jumlah raperbup dan draf SK 15 unit/ | OPD |
|   |   |   | yang disusun                         |     |
|   |   |   | Jumlah sistem aplikasi SAKIP         |     |
|   |   |   | yang dikelola                        |     |
|   |   |   | Jumlah unit/OPD yang                 |     |
|   |   |   | difasilitasi dalam pembangunan       |     |
|   |   |   | Zona Integritas                      |     |

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.